



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**TAHUN 2021**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	92,75	93,09	100,37
2	Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	359.414.644.053,00	414.873.670.802,17	115,43

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan melebihi target yang telah ditetapkan.

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja instansi harus dibuat pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disusun sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Badan pengelolaan Keuangan telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Januari 2022  
Kepala

Wasesa, SH.  
NIP. 19640506 199303 1 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi .....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
1.4 Isu Strategis .....	4
1.5 Keadaan Pegawai .....	7
1.6 Sarana dan Prasarana .....	8
1.7 Keuangan .....	9
1.8 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1 Perencanaan Strategis .....	11
2.1.1. Tujuan Strategis .....	14
2.1.2. Sasaran Strategis .....	14
2.1.3. Indikator Sasaran Strategis .....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	17
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021 .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	22
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis. ....	23
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.. ....	24
3.4 Realisasi Anggaran .....	29
3.5 Inovasi .....	35
BAB IV PENUTUP .....	36
4.1 Kesimpulan .....	36
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	37

## LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun) & Metadata
3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Pengukuran kinerja TW IV tahun 2021
5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya
6. Penghargaan yang pernah diterima

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Pada Tahun 2020 terjadi pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang berdampak di seluruh lini kehidupan termasuk lingkungan Pemerintahan khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan pengalihan sebagian anggaran APBD untuk menanggulangi dampak pandemi dan berlangsung hingga kegiatan tahun anggaran 2021 berakhir.

Laporan Kinerja (LKj) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja (LKj) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

## **1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

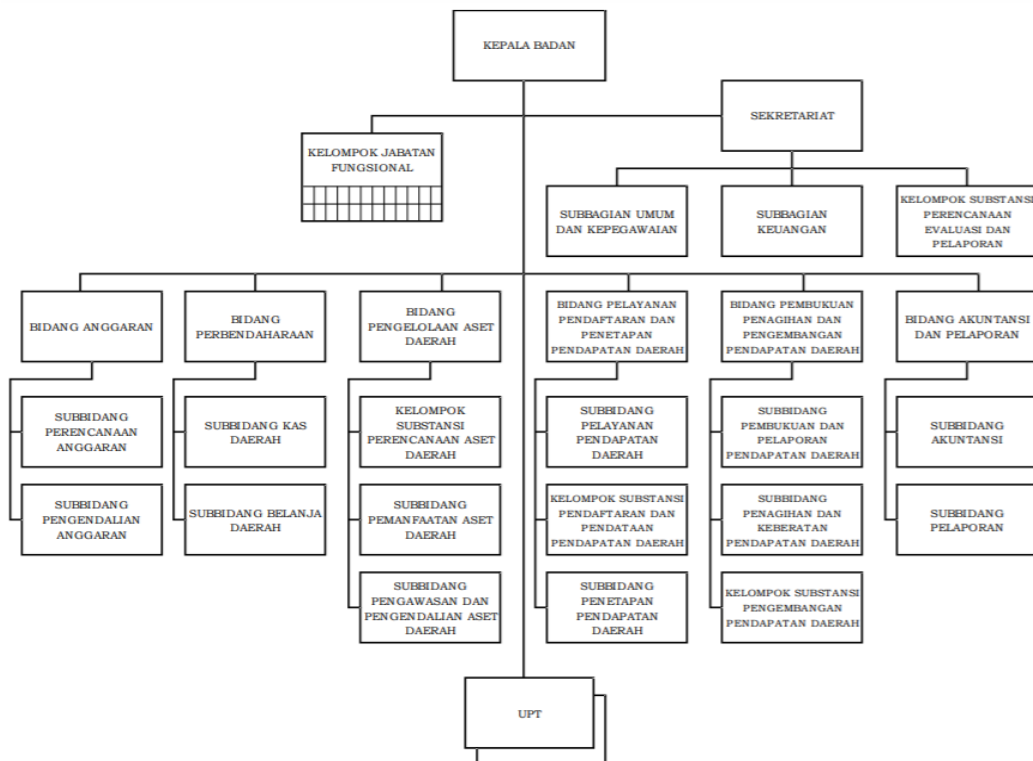
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, organisasi BPKAD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. Subbagian Keuangan
  3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Anggaran terdiri dari :
  1. Subbidang Perencanaan Anggaran
  2. Subbidang Pengendalian Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  1. Subbidang Kas Daerah
  2. Subbidang Belanja Daerah
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
  1. Subbidang Akuntansi
  2. Subbidang Pelaporan

- f. Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  1. Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah
  2. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah
  3. Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah
- g. Bidang Pembukuan, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
  1. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah
  2. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
  3. Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah
- h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
  1. Subbidang Perencanaan Aset Daerah
  2. Subbidang Pemanfaatan Aset Daerah
  3. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah

Adapun Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi**





### **1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta merupakan bentuk tanggungjawab secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun dan menjadi alat evaluasi dalam pencapaian sasaran program dan output kegiatan.

### **1.4 ISU STRATEGIS**

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan. Pedoman penyusunan pelaporan kinerja diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai Good dan Clean Governance.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan ketugasan adalah :

1. Kepatuhan anggaran OPD.
2. Masih ada beberapa OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak sesuai standar akuntansi serta belum tepat waktu.
3. Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD masih perlu ditingkatkan.
4. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
5. Data Wajib Pajak Daerah belum selalu update dan status Obyek Pajak sering berubah.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
7. Penagihan piutang pajak perlu ditingkatkan.
8. Perlu adanya evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai yang berkelanjutan untuk mendukung transparansi keuangan daerah.
9. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
10. Kepatuhan Wajib Pajak dalam perhitungan dan pelaporan pajak masih perlu ditingkatkan.
11. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang pengguna di masing-masing OPD.

12. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisien dan efektif.
2. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis untuk memotivasi OPD dalam menyusun laporan keuangan supaya data valid, sesuai standar akuntansi Pemerintah dan tepat waktu.
3. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan pada BLUD.
4. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk RKBMD, dan distribusi serta pembinaan terhadap pengelolaan barang milik daerah.
5. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan obyek pajak.
6. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak.
7. Melakukan pemeriksaan, dan akan melakukan penagihan pajak PBB dengan pekan pembayaran PBB.
8. Melaksanakan evaluasi transaksi non tunai.
9. Meningkatkan dan mengevaluasi SPIP.

Kemudian dalam rangka mempertahankan WTP yang telah diraih Pemerintah Kota Yogyakarta selama 12 kali berturut turut, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi secara berkala dengan OPD untuk rekonsiliasi SPJ Fungsional.
2. Melakukan sinkronisasi laporan keuangan yang telah disusun oleh OPD secara berkala.
3. Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan DIY untuk melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan.
4. Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan DIY untuk melakukan pendampingan dalam melakukan review peraturan terkait akuntansi dan pelaporan.

5. Melakukan penataan Barang sesuai dengan kelembagaan baru.
6. Melakukan penyesuaian Kodefikasi BMD yang mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019.
7. Mengembangkan SIMBADA Versi 2 yang mengakomodasi penyesuaian kodefikasi baru dan kelembagaan baru.
8. Melakukan sosialisasi dan melaksanakan pendampingan bimbingan teknis untuk aplikasi SIMBADA V.2 bagi Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pengguna/Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Melakukan koordinasi rutin antar bidang di BPKAD untuk mengantisipasi/memetakan permasalahan dan segera mencari solusinya.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### 1.5 KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Pangkat dan Golongan Pegawai**

<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Kepala	Pembina Utama	IV/c	1 orang
Sekretaris	Pembina	IV/b	1 orang
Kepala Bidang	Pembina	IV/a	5 orang
Kepala Subbag/Sub. Bid.	Pembina Penata TK I	IV/a III/d	4 orang 12 orang
Jabatan Fungsional Umum	Ahli Madya/Penata Tk I Terampil Pelaksana/Pengatur Tk I	III/d  II/d	1 orang  1 orang

<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Staf	Penata Tk. I	III/d	3 orang
	Penata	III/c	18 orang
	Penata Muda Tk. I	III/b	26 orang
	Penata Muda	III/a	14 orang
	Pengatur Tk. I	II/d	5 orang
	Pengatur	II/c	1 orang
	Pengatur (CPNS)	II/c	37 orang
	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang

*Sumber data: Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian, Des 2021*

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut : 130 orang.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Pendidikan Pegawai**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JMLAH</b>
Master/S2	15 orang
Sarjana/S1	46 orang
Diploma/D3	35 orang
SLTA/ sederajat	32 orang
SLTP	2 orang

*Sumber data: Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian, Des 2021*

## **1.6 SARANA DAN PRASARANA**

Kebutuhan Sarana dan Prasana untuk mendukung adalah :

**Tabel 1.3**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung**

<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
Kendaraan roda empat	10	buah	Baik
Kendaraan roda dua	48	buah	Baik
Sepeda	1	buah	Baik
Ruang rapat	3	buah	Baik
PC Unit	90	buah	Baik
PC Server	1	buah	Baik
UPS	100	buah	Baik
Printer	150	buah	Baik
Laptop	8	buah	Baik

<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
LCD Proyektor	12	buah	Baik
Komputer	44	buah	Baik
Telepon	14	buah	Baik
Mesin Fax	1	buah	Baik
Rak Besi	34	buah	Baik
Rak Kayu	29	buah	Baik
Kamera Foto Digital	8	buah	Baik
Wireless Mic.	3	buah	Baik
Gambar presiden/Wapres	2	buah	Baik
Kursi Tamu	4	stel	Baik
Meja Rapat	76	buah	Baik
Meja Tulis	16	buah	Baik
Meja ½ biro	170	buah	Baik
Meja Komputer	54	buah	Baik
Meja Knap	9	buah	Baik
Meja Ketik	23	buah	Baik
Kursi Putar	74	buah	Baik
Kursi Besi	45	buah	Baik
Kursi kayu	37	buah	Baik
Kursi Lipat	220	buah	Baik
Almari besi	6	buah	Baik
Almari Kayu	2	buah	Baik
Almari Kaca	9	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik
Radio Cassette Rec.	1	buah	Baik

*Sumber data: Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian , Des 2021*

## **1.7 KEUANGAN**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Alokasi anggaran murni BPKAD untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp55.470.977.238,- dan anggaran perubahan sebesar Rp98.518.856.694,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

## **1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kota Yogyakarta tahun 2021 disusun sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
4. BAB IV PENUTUP
5. LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2017 – 2022 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Walikota.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

**“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk pemberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.



3. Memperkuat Moral, Etika dan budaya Masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, kesehatan, social budaya.
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berkaitan dengan Misi dan program kerja Walikota tahun 2017–2022, untuk lima tahun ke depan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu misi Walikota ke 7(tujuh) **“Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih” dan mendukung sasaran no 13 yaitu Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.**

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota.

Program adalah Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dengan Renja. Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang terkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;

2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 -2022 adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target**

Tujuan :	1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah			
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Program</b>
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	92,75	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pendapatan asli daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	359.414 .644.05 3	Pendapatan asli daerah meningkat	Pengelolaan Pendapatan Daerah

Cara pengukuran :

1. Pengukuran untuk sasaran strategis “Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat” dihitung dengan 25% kinerja Kegiatan perencanaan

dan pengendalian + 25% kinerja kegiatan pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja kegiatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja kegiatan pengelolaan barang milik daerah.

2. Sedangkan untuk sasaran strategis “Pendapatan asli daerah m”ingkat” diukur dari Nilai Pendapatan Asli Daerah.

### **2.1.1 Tujuan Strategis**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu Tahun 2017–2022 yakni meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

Dalam memformulasikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta akan lebih baik apabila mengetahui sumberdaya yang ada dan kemampuan yang dimiliki BPKAD Kota Yogyakarta, untuk mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang sesuai dengan Misi Walikota yaitu Misi ke 7 (tujuh) **“Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih”**.

### **2.1.2 Sasaran Strategis**

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan

sasaran strategis, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat;
2. Pendapatan Asli daerah meningkat.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis BPKAD Kota Yogyakarta**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT UAN	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	89,37	90,44	91,54%	92,63%	92,75 %	94,08 %
2	Pendapatan Asli Daerah meningkat	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	59%	59%	-	-	-	-
		Nilai Pajak Daerah	Rp	-	-	425.381.500.000	451.106.500.000	-	-
		Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	-	-	-	-	359.414.644.053	572.946.498.463

### 2.1.3 Indikator Sasaran Strategis

Bahwa setiap OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (Sasaran Indikator) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Yogyakarta adalah :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Nilai Pendapatan Pajak Daerah.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Sasaran Strategis BPKAD Kota Yogyakarta**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pengelolaan keuangan daerah	Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
			Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan dana Transfer
			Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban
		Pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan barang milik daerah
2.	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Pengelolaan pendapatan daerah	Pengelolaan pendapatan daerah

Cara pengukuran indikator kinerja utama dengan fomula indikator tujuan dihitung dengan presentase kinerja suatu perangkat daerah.

Penetapan target kinerja sudah beberapa kali diubah melalui reviu penetapan kinerja yang dituangkan dalam metadata indikator sasaran dan program perangkat daerah. Formula yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut :

Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data	Perhitungan	Target yang dihasilkan
Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu : 4 jumlah dokumen penganggaran : 4	$(4:4) \times 100\%$	100%
Persentase penyerapan belanja daerah	Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	realisasi belanja daerah tahun n perencanaan belanja daerah tahun n		

Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data	Perhitungan	Target yang dihasilkan
Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik : 41 jumlah seluruh OPD : 44	$(41:44) \times 100\%$	93,18%
Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik : 36 jumlah seluruh OPD : 41	$(36:41) \times 100\%$	87,80%
Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah tahun n	Nilai pendapatan Pajak Daerah tahun n		

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Dalam

Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	92,75
2.	Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	359.414.644.053

Program :

1. Pengelolaan keuangan daerah	Rp.	55.361.981.998,-
2. Pengelolaan barang milik daerah	Rp.	4.969.454.006,-
Jumlah :	Rp.	60.331.436.004,-
3. Pengelolaan pendapatan daerah	Rp.	2.774.351.350,-

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

### **2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021**

Rencana Kinerja Tahun 2021 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang terpilih yaitu : **“Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih”**.

Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Yogyakarta melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.



**Tabel 2.5**  
**Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Prosentase</b>
<b>Belanja Operasi</b>	41.659.726.250,-	42,28%
<b>Belanja Modal</b>	2.157.592.000,-	2,19%
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	53.642.020.964,-	54,45%
<b>Belanja Transfer</b>	1.059.517.480,-	1,08%
<b>Jumlah</b>	98.518.856.694,-	100%

Anggaran belanja Tahun Anggaran 2021 dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Anggaran Belanja per Sasaran Strategis**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Prosentase</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	60.331.436.004	61,24%	Prosentase dihitung berdasarkan total belanja sebesar Rp98.518.856.694,-
2.	Pendapatan Asli Daerah meningkat	2.774.351.350	2,82%	

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menampung 4 (empat) program terdiri dari 1 (satu) program penunjang dengan 6 (enam) kegiatan dan 17 sub kegiatan serta 3 (tiga) program utama dengan 5 (lima kegiatan) dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2021**

No.	Nama Program	Kegiatan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan tabel di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **1.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2021 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2021.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	92,75	93,09	100,37%
2	Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	359.414.644.053,00	414.873.670.802,17	115,43%

Dari tabel di atas, terdapat dua sasaran yang terbagi dalam dua indikator. Pada tahun 2021, Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 93,09% dari target sebesar 92,75% atau sebesar 100,37% dari target. Sementara itu, Nilai Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan target anggaran perubahan APBD telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 115,43%.

Jadi kedua indikator diatas semuanya memenuhi target. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kerjasama yang erat semua bidang di BPKAD Kota Yogyakarta.

## **1.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS**

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis dapat diformulasikan dalam dua indikator kinerja, yaitu **akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset meningkat serta peningkatan pajak daerah**. Indikator sesuai kriteria spesifik, dapat dinilai, dan diukur, berorientasi pada hasil dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis yang telah dicapai yaitu :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan indikator nilai pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar Rp359.414.644.053,00 dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp414.873.670.802,17 yaitu sebesar 115,43%.
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah, dengan indikator sasaran Penilaian audit eksternal dengan target renstra adalah Wajar dan capaian kinerjanya Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dan telah meraih WTP ke 12 (dua belas).

3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, dengan target 87,80% telah terealisasi sebesar 85,37%.
4. Optimalisasi pajak daerah dengan indikator realisasi pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp372.462.884.357,00 dari target pajak daerah sebesar Rp Rp324.206.500.000,00 yaitu sebesar 114,88%.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Pajak Daerah**

No.	JenisPajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	45.000.000.000,00	69.577.661.221,00	154,62
2.	Pajak Restoran	44.100.000.000,00	46.257.454.698,00	104,89
3.	Pajak Hiburan	2.700.000.000,00	2.972.217.801,00	110,08
4.	Pajak Reklame	6.300.000.000,00	7.293.470.597,00	115,77
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.300.000.000,00	45.101.915.431,00	99,56
6.	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	2.034.806.805,00	101,74
7.	Pajak Air Tanah	2.300.000.000,00	2.815.195.873,00	122,40
8.	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.700.000,00	103,08
9.	Pajak Bumi & Bangunan	92.500.000.000,00	97.678.727.427,00	105,60
10.	BPHTB	84.000.000.000,00	98.724.734.504,00	117,53
	<b>JUMLAH</b>	<b>324.206.500.000</b>	<b>372.462.884.357</b>	<b>114,88</b>

BPKAD melakukan reviu terhadap Indikator kinerja program yang mendukung indikator kinerja sasaran melalui rapat koordinasi internal maupun eksternal yang melibatkan stakeholder BAPPEDA dan Bagian Organisasi. Pemantauan dan evaluasi hasil rencana kerja dilakukan setiap tribulan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang terdapat pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

### **1.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA**

Analisis Capaian Kinerja lainnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD.

Selain pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga menjalankan ketugasan dalam pelayanan dibidang pajak daerah yang

tercantum dalam uraian tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampu menghasilkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah. Indikator Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pada kriteria sebuah indikator program, output dan target output. Untuk mengukur keberhasilan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempertimbangkan objektivitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Yogyakarta**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULA INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan keuangan dan aset daerah Target : 92,75%	Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	1. Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
		Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%		88,20%	87,00%	92,84%
		Jumlah OPD dengan Laporan Keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%		95,00%	100%	105,26%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		Jumlah OPD dengan Laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	2. Pengelolaan barang milik daerah aset	87,80%	85,37%	97,23%
Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah : 359.414.644.053,00	Realisasi ketercapaian pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan BLUD dan BUMD Non Bunga, Non denda, non pengembalian	Pengelolaan pendapatan daerah	100%	100%	100%
		Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar		100%	123,16%	123,16%
		Nilai Pendapatan Pajak Daerah		100%	114,88%	114,88%

Dalam mengukur capaian indikator “Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah” Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021 didasarkan pada :

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja ditetapkan 100%, penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja, sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Rumusan yang digunakan untuk menghitung presentase capaian target indikator kinerja, seperti tersebut pada Formula indikator program adalah :  
Capaian indikator Kinerja =  $\text{Realisasi} : \text{target} \times 100\%$
3. Cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran kinerja, bahwa kinerja masing-masing program untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah kegiatan pengelolaan keuangan dan aset dengan bobot 100 % dari nilai masing-masing

program pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu dengan formula indikator sebagai berikut :

25% dari kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah + 25% kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan perbendaharaan daerah + 25% kinerja kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah + 25% kinerja kegiatan pengelolaan barang milik daerah daerah. Indikator sasaran pada pendapatan pajak daerah meningkat diukur dari Jumlah Pajak Daerah di tahun 2021. Dari Capaian Kinerja tersebut diatas maka capaian dapat dihitung sebagai berikut :

- kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah :  
 $25\% \times 100\% = 25,00\%$
- kegiatan koordinasi dan penyusunan perbendaharaan daerah :  
 $25\% \times 87,00\% = 21,75\%$
- kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah :  
 $25\% \times 100\% = 25,00\%$
- kegiatan pengelolaan barang milik daerah daerah :  
 $25\% \times 85,37\% = 21,34\%$

Maka Capaian kinerja pengelolaan keuangan untuk indikator sasaran pada IKU "indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah" telah mencapai sebesar  $25,00\% + 21,75\% + 25,00\% + 21,34\% = \mathbf{93,09\%}$

4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut dengan asumsi bahwa :

85 s/ 100 : sangat berhasil

70 s/d 85 : Berhasil

55 s/d 70 : Cukup berhasil

0 s/d 55 : Kurang berhasil



Dengan Nilai sebesar 93,09% Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta memiliki predikat "**sangat berhasil**". Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis kinerja untuk pencapaian kinerja yang memberikan informasi lebih transparan dalam capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Indikator program Pengelolaan Pendapatan daerah ada 3 indikator yaitu :

1. Realisasi ketercapaian pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan BLUD dan BUMD Non bunga, Non denda, non pengembalian sebesar 100%
2. Pendapatan pajak ditargetkan sebesar Rp324.206.500.000,00 terealisasi Rp372.462.884.357,00 atau 114,88% yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallow, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar ditargetkan sebesar Rp16.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp106.017.384.084,24.

Upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian tersebut antara lain :

- a. Memasang alat monitoring di tempat usaha Wajib Pajak
- b. Menerbitkan Surat Teguran terhadap Ketetapan Pajak yang sudah jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran
- c. Mengikutsertakan personil untuk ikut Bimbingan Teknis Penagihan Pajak Daerah/Juru Sita diadakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
- d. Kerjasama dengan Perangkat Daerah/Institusi lain antara lain dengan:
  - 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Apabila Surat Teguran tidak diindahkan maka dilakukan pemanggilan dan ditangani bersama BPKAD Kota

Yogyakarta dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk selanjutnya dibuat Berita Acara yang berkaitan dengan proses penyelesaian tunggakan dan apabila Berita Acara yang dibuat tidak diindahkan maka dapat dilakukan proses Penegakan Peraturan.

- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apabila Surat Teguran tidak diindahkan maka dapat meminta bantuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melayangkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan bahwa Ijin dapat ditinjau kembali apabila tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengukur capaian indikator “Nilai Pendapatan Asli Daerah” berdasarkan jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun 2021.

Atas capaian tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian nilai pajak daerah oleh BPKAD berhasil.

#### **1.4 REALISASI ANGGARAN**

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta telah mencapai nilai melebihi target yang di tentukan. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja.

Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja BPKAD Kota Yogyakarta dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut pada Tabel 3.3 diatas, maka untuk target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai seperti tersebut pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Anggaran**

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.467.000,00	1.824.000,00	40,83%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.002.134.191,00	23.301.905.672,00	83,21%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	811.712.100,00	747.712.752,00	92,12%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.825.000,00	12.599.000,00	98,24%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.878.568.562,00	5.301.405.708,54	90,18%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.362.487,00	59.6340.895,16	84,78%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	133.044.767,00	99.525.821,54	74,81%
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	54.735.113.444,00	6.443.726.220,00	11,77%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	302.546.293,00	288.442.981,20	95,34%

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.969.454.006,00	4.371.113.865,58	87,96%
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan pendapatan Daerah	2.774.351.350,00	2.757.410.179,40	99,39%
			<b>98.518.856.694,00</b>	<b>44.110.457.575,50</b>	<b>44,77%</b>

Perbandingan dengan realisasi tahun lalu ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan Persentase Realisasi tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Kegiatan	2019	2020	2021
1.	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsolidasi	99,95%	75,14%	89,83%
2.	Penyediaan Jasa,Peralatan dan perlengkapan kantor	92,70%	97,36%	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	97,39%	0%	
4.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	78,10%	90,77%	
5.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	86,96%	0%	
6.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja	99,94%	99,59%	40,83%
7.	Perencanaan Anggaran	97,65%	99,36%	78,81%
8.	Pengendalian Anggaran	95,39%	99,81%	
9.	Pengendalian Belanja Daerah	94,58%	99,55%	11,77%
10.	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	95,51%	99,56%	
11.	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	92,53%	81,86%	95,34%
12.	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	89,67%	100%	
13.	Pelayanan Pajak daerah	100%	98,44%	99,39%
14.	Pendaftaran dan Pendataan Pajak daerah	98,43%	92,09%	
15.	Penetapan Pajak Daerah	100%	99,75%	
16.	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan pembinaan Pajak Daerah	98,13%	98,54%	
17.	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	97,97%	89,07%	

No	Kegiatan	2019	2020	2021
18.	Perencanaan, Pengadaan dan distribusi Aset	94,85%	97,61%	87,96%
19.	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	91,34%	81,60%	
20.	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	74,01%	91,53%	

Realisasi beberapa kegiatan tidak terserap maksimal antara lain :

1. Laporan dan pembuatan profil keuangan daerah sudah berbentuk soft file.
2. Pada kegiatan pengelolaan perbendaharaan daerah terdapat anggaran belanja tidak terduga yang hanya digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan, sehingga ketika anggaran tersebut tidak digunakan maka terdapat sisa anggaran. Untuk tahun 2021 dari anggaran sebesar Rp53.642.020.964,00 hanya terealisasi sebesar Rp5.350.719.740,00 atau 9,97%.

**Tabel 3.5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah	92,75	93,09	100,37	60.331.436.004,00	11.391.259.368,40	18,88%
2	Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	359.414.644.053,00	414.873.670.802,17	115,43	2.774.351.350,00	2.757.410.179,40	99,39%
<b>Jumlah</b>						63.105.787.354,00	14.148.669.547,80	23,45%
<b>Total Belanja</b>						<b>98.518.856.694,00</b>	<b>44.110.457.575,50</b>	<b>44,77%</b>
<b>Total Belanja</b>		(tanpa Anggaran Belanja Tidak Terduga)				<b>44.876.835.830,00</b>	<b>38.759.737.835,50</b>	<b>86,37%</b>

Analisis Akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Yogyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, asset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pengelolaan pajak daerah yang meliputi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan. Realisasi keuangan tidak sesuai d
2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta. Skala pengukuran ordinal rata-rata capaian indikator output adalah **93,09%** dari target 100% masuk katagori "**sangat berhasil**".
3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta telah melampaui target melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dan asset daerah dengan cara meminimalkan permasalahan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknik, monitoring, pendampingan kepada Perangkat Daerah secara intensif dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari

perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian realisasi cukup tinggi dikarenakan Belanja Tidak langsung meliputi Belanja Gaji PNSD yang merupakan belanja wajib dan mengikat.

Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output dan target output kegiatan sesuai yang ditargetkan. Adapun dari anggaran Belanja Langsung per sasaran program dilihat dari serapan anggaran untuk :

1. Pencapaian realisasi kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah sebesar 100,37%.
2. Realisasi kinerja Pendapatan Asli Daerah sebesar 115,43%.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa BPKAD berhasil melaksanakan tugas pencapaian sasaran kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

**Tabel 3.6**  
**Analisis efisiensi**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,37%	18,88%	5,32
2	Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	115,43%	99,39%	0,87

Dari dua Sasaran strategis, terdapat dua sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Sasaran Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat Telah mencapai kinerja sebesar 100,37% dengan efisiensi anggaran 5,32. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan untuk semua program

2. Sasaran Pendapatan Pajak Daerah meningkat Telah mencapai kinerja sebesar 115,43% dengan efisiensi anggaran 0,87. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui adanya upaya intensif seperti optimalisasi teknologi, melaksanakan pekan pembayaran serta Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online.

### **1.5. INOVASI**

BPKAD melakukan beberapa inovasi terutama yang terkait dengan pelayanan terhadap wajib pajak, berupa aplikasi antara lain e\_STPPD, SiSMIOP, Mapatda dan POS-PBB.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. BPKAD sudah berhasil melakukan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah dengan nilai sebesar 114,88%
2. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 12 (dua belas).
3. Berhasil melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas sehingga telah terealisasi sebesar 85,37%.

4. Capaian kinerja pengelolaan keuangan (non strategis) telah mencapai 100% dengan kategori baik.
5. Realisasi anggaran capaian indikator keuangan adalah 93,09% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dilihat dari nilai capaian di atas sehingga termasuk dalam kategori berhasil.

#### **4.2 RENCANA TINDAK LANJUT**

Pada akhir tahun 2019 terbit Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single code base* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Peraturan ini berlaku dan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran.2021. Berdasarkan hal tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta telah mereviu Rencana Kerja tahun 2021, Indikator Sasaran dan Indikator Program Periode RPJMD Tahun 2021-2022, sebagai berikut :

- a. Program dan Kegiatan mengalami perubahan nomenklatur sehingga menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- b. Penambahan satu Subbidang yaitu Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah pada Bidang Pengelolaan Penagihan, Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
- c. Mengubah Indikator Sasaran Perangkat Daerah yang semula “Nilai Pajak Daerah” menjadi “Nilai Pendapatan Asli Daerah”

